

## Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money

Novi Fadhila, Julianda Syahputra Tanjung

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [novifadhila@umsu.ac.id](mailto:novifadhila@umsu.ac.id), [juliandasyahputra1998@gmail.com](mailto:juliandasyahputra1998@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to measure the performance of the local government of Deli Serdang Regency based on value for money. This study uses a descriptive approach, data collection in this study uses documentation techniques, and the analysis used is descriptive analysis techniques. The results showed that the performance of the local government of Deli Serdang Regency with the value for money method as measured by the economic ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio within a period of 5 years from 2016 to 2020 experienced fluctuations where the economic ratio of Deli Serdang Regency fluctuated. Serdang Regency experienced stability or could be called quite efficient in saving local government spending in Deli Serdang Regency, the effectiveness ratio fluctuated but was in a fairly effective condition, and the efficiency ratio decreased.*

**Keywords:** *Value For Money, Economical, Efficiency, Effectiveness*

### Pendahuluan

Setiap organisasi baik bisnis maupun publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai. Untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasarannya diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan (Rahayu, 2005).

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi nonprofit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam banyak hal. Lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan disatu sisi dan disisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah (Rahayu & Ginting, 2017).

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kondisi yang mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat karena saat ini masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Pengukuran Kinerja secara umum adalah pengukuran terhadap kinerja yang dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Hery, 2019). Artinya pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya pada masa yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dianggap sebagai salah satu faktor penting karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran

kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun *reward* yang layak (Silaban & Harefa, 2017).

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas (Mahmudi, 2019). Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dan bagi organisasi sektor publik khususnya di pemerintahan daerah pengukuran pembangunan kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui pelaksanaan manajemen public yang baik (Indrayani & Khairunnisa, 2018).

Kepentingan urusan publik menjadikan indikator pengukuran kinerja sebagai alat evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan daerah agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan yaitu kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis. Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, salah satunya menggunakan metode *value for money*. *Value For Money* merupakan anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, efektif.

Pengukuran kinerja pada sektor publik dilakukan karena selama ini sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kinerja yang mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Dengan dilakukannya maksud dari pengukuran kinerja, maka kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif.

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas (Sihombing, 2018).

Kabupaten Deli Serdang mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Kementerian Keuangan karena Kabupaten Deli Serdang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut. Wujud dari keberhasilan tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan melalui Dirjen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPK, Mercy Monika R. Sitompul. Penghargaan tersebut diberikan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi, Kamis (12/11).

Sebelumnya, Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan penghargaan yang sama di Tahun 2019. Kepala Dirjen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPK, Mercy Monika R. Sitompul mengatakan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Penyerahan Plakat WTP atas Capaian Opini LKPD Tahun 2019 Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual. Tahun ini pemerintah pusat kembali meraih Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2019.

Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) audited tahun 2019 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini WTP dari LKKL, dari sebelumnya 81 menjadi 84 pada Tahun Anggaran 2019 dari total 87 K/L. Pencapaian positif juga dialami pada pengelolaan keuangan daerah (Serdang.go.id, 2019). Namun munculnya beberapa permasalahan dan keluhan, mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi kepuasan yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang.

### **Kajian Teori Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara terbuka, dan bertanggungjawab untuk kemakmuran masyarakat, demi terlaksananya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam melaksanakan asas otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan daerah yang mana dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan keperluan daerah yang dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari berbagai prosedur yang harus dilalui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau yang sering disebut (PPKD).

Keuangan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, sebab Pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa sistem pengelolaan keuangan yang baik yang merupakan salah satu kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu proses yang paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah ialah dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara termasuk keuangan daerah diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, terkhusus Bab II tentang pelaporan keuangan dan kinerja, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (Indonesia B. P., 2006).

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi oleh BPK, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, adapun Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, menyatakan bahwa: "PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah"

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sering disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tiap-tiap daerah memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki sebutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disebut juga BPKAD.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Indonesia B. P., 2005). Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan prinsip *value for money* menerapkan prinsip ekonomi, efisien, dan efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus menghasilkan *output* yang maksimal (berdayaguna). Selanjutnya, efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan *public* (Yuwono, 2008).

### Value For Money

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

*Value for Money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Riadi, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut antara lain:

1. Indikator alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisien)
2. Indikator kualitas pelayanan (Efektifitas)

### Rasio Ekonomis

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio ekonomis belanja daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya belanja daerah}}{\text{anggaran Biaya belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1  
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2019)

### Rasio Efisiensi

Efisiensi pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. rumus efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{belanja daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2**  
**Klasifikasi Pengukuran Efisiensi**

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efficient
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

### Rasio Efektivitas

Keberadaan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan Daerah menurut Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\% (\text{Mahmudi, 2019})$$

**Tabel 3**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis Data yang digunakan data sekunder, berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data tahun 2016 - 2020.

### Hasil Dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

**Tabel 4**  
**Rasio Ekonomis Kabupaten Deli Serdang**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2016	3.384.048.577.213.08	3.086.110.287.501.00	91,19	Ekonomis
2017	3.766.358.253.124.00	3.377.783.242.083.88	89,68	Cukup Ekonomis
2018	3.733.345.654.763.76	3.497.039.137.164.00	93,67	Ekonomis
2019	4.016.480.823.937.00	3.529.117.634.226.00	87,86	Cukup Ekonomis
2020	3.190.043.526.723,12	2.770.409.994.709,19	86,84	Cukup Ekonomis

Sumber: Data diolah

**Tabel 5**  
**Rasio Efisiensi Kabupaten Deli Serdang**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2016	3.086.110.287.501.00	3.484.303.242.110.00	88,57%	Cukup Efisien
2017	3.377.783.242.083.88	3.405.026.538.803.00	99,19%	Kurang Efisien
2018	3.497.039.137.164.00	3.733.345.654.763.00	93,67%	Kurang Efisien
2019	3.529.117.634.226.00	3.573.056.389.618.75	98,74%	Kurang Efisien
2020	2.770.409.994.709,19	3.335.349.826.580.82	83.06%	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah

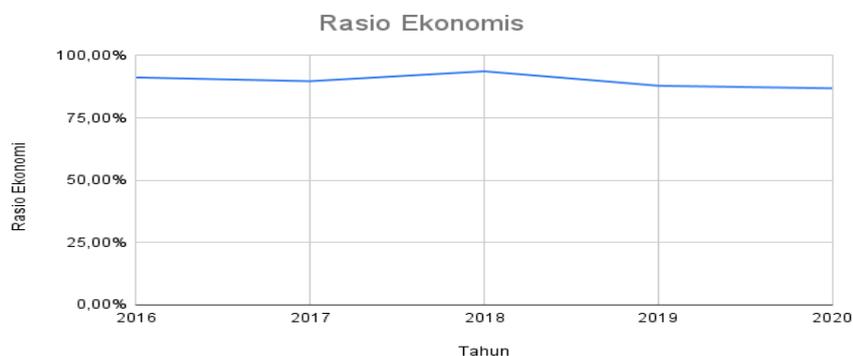
**Tabel 6**  
**Efektivitas Pendapatan Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang**

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2016	3.241.872.674.803.00	3.484.303.242.110.00	107,47	Sangat Efektif
2017	3.498.428.422.033.00	3.405.026.538.803.00	97,33	Efektif
2018	3.640.579.921.809.00	3.733.345.654.763.00	102,54	Sangat Efektif
2019	3.986.480.823.937.00	3.573.056.389.618.75	89,62	Cukup Efektif
2020	3.951.483.270.425.00	3.335.349.826.580.82	84,40	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah

### Analisis Data Ekonomis

Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat



dalam grafik dibawah ini :

Rasio ekonomis pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan stabil. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap target belanja yang telah ditentukan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

### Efisiensi

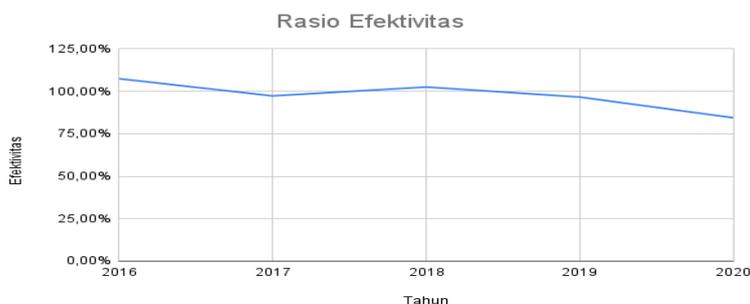
Perkembangan rasio efisiensi daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini tidak baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Dengan meningkatkan rasio efisiensi atas pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa kinerja dari BPKAD Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

### Efektivitas

Perkembangan efektivitas pendapatan daerah dapat dilihat dalam grafik berikut:



Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung juga mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunkan rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

### Pembahasan Ekonomis

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diukur dengan menggunakan *value for money* kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif dengan kondisi tahun 2020 menurun. Namun secara umum rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang mengalami kestabilan atau bisa disebut dengan sudah cukup ekonomis dalam penghematan dalam belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini didukung dengan teori Rasio ekonomi yaitu penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik (Mahsun, 2019). Penelitian ini didukung

penelitianterdahulu dengan hasil kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif (Sari, Suwendra, & Cipta, 2018).

### Efisiensi

Rasio efisiensi Kabupaten Deli Serdang tidak mengalami kestabilan hal ini dapat dilihat bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir rasio efisiensi memiliki rasio efisiensi menurun, hal ini disebabkan oleh peningkatan terjadi dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Sedang, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik(Mardiasmo, 2017).Penelitian ini didukung penelitian terdahulu dengan hasil kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerahyang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalamiangka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah(Machmud, Kawung, & Rompas, 2014).

### Efektifitas

Untuk rasio efektivitas mengalami fluktuasi akan tetapi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat dikategorikan sudah efektif.Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Sari N. C., 2014) yang menyatakan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik.

### Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money* adalah :Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif. Rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang mengalami kestabilan (sudah cukup ekonomis) dalam penghematan dalam belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.Sedangkan untuk rasio efektivitas menurun.Rasio efisiensi daerah ditahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan namun dengan kategori efektif.

#### Saran

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Sedang dapat melakukan penghematan biaya operasional yang dikeluarkan.Sehingga kinerjaPemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang segi ekonomis dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang harus lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM yang ada, agar dalam proses pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan benar. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan agar penekanan biaya dapat dimaksimalkan sehingga realisasi pendapatan daerah tetap efisien.

### Referensi

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negri Tebing Tinggi. *Riset Akuntansi dan Bisnis*, 52 - 64.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hanum, Z. (2011, April 10). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 1 - 23.
- Hery. (2019). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Grasindo.
- Indonesia, B. P. (1999, Mei 19). [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_25.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_25.pdf). Retrieved January 23, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45337/uu-no-25-tahun-1999>: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_25.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_25.pdf)
- Indonesia, B. P. (2005, Desember 09). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>. Retrieved January 23, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Indonesia, B. P. (2006, Mei 15). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>. Retrieved January 22, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Indonesia, B. P. (2006, April 03). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>. Retrieved January 20, 2022, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/8tahun2006pp.htm>: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/8tahun2006pp.htm>
- Indonesia, B. P. (2019, Maret 06). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>. Retrieved February 22, 2022, from [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf): [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf)
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUEFOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE(STUDI KASUS PADA DPKAD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2014-2016). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1 - 10.
- Keuangan, K. (1999, Mei 07). [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf). Retrieved Januari 23, 2022, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>
- Latief, A., & Wilanda, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan Pada Biro Penggadaan Jasa PT. Semen Padang. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 56 - 60.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Andi.
- Rahayu, S. (2005). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan.
- Rahayu, S., & Ginting, E. S. (2017). Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintah Kota Medan. *Mutiara Akuntansi*, 1 - 17.
- Riadi, M. (2020). *Pengertian dan Fungsi Perbankan*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, N. C. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.
- Serdang.go.id, K. D. (2019, November 12). Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Raih Penghargaan Dari Kemenkeu RI Atas LKPD TA 2019. Lubuk Pakam, Sumatera Utara.
- Sihombing, P. (2018). *Corporate Financial Management*. Bogor: PT. Penerbit IPB Pres.
- Silaban, A., & Harefa, M. S. (2017). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen.
- Ulum MD, I. (2012). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuwono, S. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayu Media Publishing.